

**PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

YULMI EKA SAPUTRA

02590/2008

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

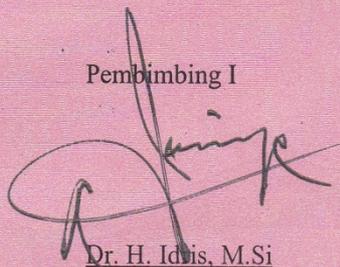
PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI
KABUPATEN/ KOTA SUMATERA BARAT

Nama : Yulmi Eka Saputra
TM/NIM : 2008/02590
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2015

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. H. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005

Pembimbing II



M. Irfan SE, M.Si
NIP. 19770409 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

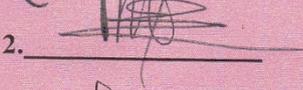
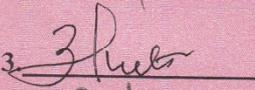
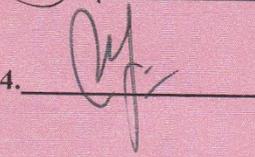
*Dinyatakan Lulus setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI
KABUPATEN/ KOTA SUMATERA BARAT**

Nama : Yulmi Eka Saputra
BP/NIM : 2008/02590
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2015

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. H. Idris, M.Si	
2. Sekretaris	M. Irfan SE, M.Si	
3. Anggota	Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS	
4. Anggota	Mike Triani, SE, MM	

SURAT PERNYATAAN

(Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulmi Eka Saputra
TM/NIM : 2008/02590
Tempat/ Tgl Lahir : Kayu Aro, 07 November 1989
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Garuda Induk No.10 Perumnas Air Tawar Barat
No. HP/Telp. : 085274197808
Judul Skripsi : "Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat".

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2015

Yang menyatakan



Yulmi Eka Sap

NIM/BP. 2008/ 02590



ABSTRAK

Yulmi Eka Saputra (2008/02590) : Pengaruh Faktor Demografi terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Bapak Dr, Idris M.Si dan Bapak Muhammad Irfan SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) Pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 2) Pengaruh rasio gender terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 3) Pengaruh dependensi rasio (ketergantungan total) terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 4) Pengaruh fertilitas terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 5) Pengaruh kepadatan penduduk, gender, ketergantungan total dan fertilitas secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data yang digunakan pooling atau panel. Teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif mencakup 1) Uji Hausman 2) Chow-Test 3) Analisis Model Regresi Panel, hasil memilih pada REM. Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 1) Uji t dan 2) Uji F dengan taraf nyata 5%.

Hasil penelitian ini adalah 1) Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 2) Rasio gender berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 3) Ketergantungan total berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 4) Fertilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat** ”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya kajian ekonomi pembangunan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Idris, M.Si dan M. Irfan SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
5. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada ibunda tercinta serta adinda dan anggota keluarga yang telah memberikan do’a dan motivasi

yang tak pernah henti-hentinya, demi terealisasinya cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan cepat.

6. Teman Teman se-angkatan 2008 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin.....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Teori	15
1. Kemiskinan	15
a. Pengertian Kemiskinan	15
b. Indikator Kemiskinan	17
c. Ukuran Kemiskinan	18
d. Faktor –faktor Demografi yang Mempengaruhi kemiskinan.....	19
2. Pengaruh Demografi Terhadap Kemiskinan.....	22
a. Teori jebakan populasi malthus.....	23
b. Pertumbuhan Penduduk	26
c. Struktur penduduk	27
d. teori keseimbangan tingkat rendah.....	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Hipotesis	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Variabel Penelitian.....	36
F. Definisi Operasional	36
G. Teknik dan Analisis Data.....	38
1. Analisis Deskriptif.....	38
2. Analisis Induktif.....	38
a. Metode Analisis Data Panel.....	38
1) Estimasi Model.....	39
b. Uji Prasyarat Analisis.....	42
c. Koefisien Determinasi.....	44
d. Pengujian Hipotesis	46
1) Uji F.....	46

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	
a. Letak Geografis Sumatera Barat	48
b. Iklim.....	49
c. Penduduk.....	50
2. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	
a. Deskripsi tingkat kemiskinan kab/ kota Di Sumatera Barat	52
b. Deskripsi Kepadatan Penduduk di Kab/ kota di Sumatera Barat	54
c. Deskripsi Rasio Gender di kab/kota di Sumatera Barat	56
d. deskripsi Ketergantungan Total di Kab/ Kota di Sumatera Barat	58
e. deskripsi Fertilitas di Kab/ Kota	

di Sumatera Barat	59
3. Analisis Induktif	
a. Analisis model regresi panel	61
1) Uji chow test.....	61
2) Uji hausman.....	61
3) Analisis Model Regresi Panel	62
b. Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	65
c. Pengujian Hipotesis	66
1) Uji t	66
2) Uji f.....	67
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat	68
2. Pengaruh Rasio Gender terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat	71
3. Pengaruh Ketergantungan Total terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat	72
4. Pengaruh Fertilitas terhadap kemiskinan di Sumatera Barat	73
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat kemiskinan (%), Kepadatan Penduduk (jiwa), dan rasio Gender (%) Di Sumatera Barat Tahun 2009-2011.....	5
Tabel 2	Rasio Beban Ketergantungan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2009-2011	10
Tabel 3	Angka Kelahiran Bayi kabupaten/ Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2011.....	11
Tabel 4	Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 2011	49
Tabel 5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2011	51
Tabel 6	Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2011	54
Tabel 7	Rasio Gender Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2011.....	55
Tabel 8	Ketergantungan Total Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2011	57
Tabel 9	Angka Kematian Bayi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2011	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Jebakan Populasi Malhus	24
Gambar 2	Kerangka Konseptual Analisis Faktor Demografi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pengentasan kemiskinan bukan pekerjaan ringan, hal ini disebabkan karena kemiskinan itu sendiri sangat kompleks sifatnya dan multi dimensi. Sehubungan dengan hal ini maka untuk memecahkan persoalannya diperlukan kebijakan, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat dan juga perlu adanya informasi tentang lokasi di daerah miskin agar program dari penyuluhan dana pembangunan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pekerjaan yang berat dan penuh tantangan. Pendekatan pertumbuhan ekonomi semata, tentunya tidak dapat diandalkan untuk menurunkan kemiskinan karena tidak semua lapisan penduduk miskin dapat disentuh oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh sebab itu dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda pengentasan kemiskinan perlu melibatkan semua pihak dan pemerintah.

Menurut pendapat Remi dan Tjiptoherijanto (2002:43), kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tidak dapat sama sekali tergantung pada kebijakan ekonomi makro saja. Kebijakan ekonomi mikro atau bahkan kebijakan ekonomi sosial harus dilakukan bersama-sama dengan kebijakan makro untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu contoh dari kebijakan ekonomi mikro dan pendekatan sosial dalam menanggulangi kemiskinan adalah pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat merupakan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) pemerintah, swasta serta masyarakat. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif serta berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk tahun 2013 pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan hingga menjadi 8 persen untuk kemiskinan nasional. Sumatera Barat untuk tahun 2013 telah berhasil menurunkan kemiskinan hingga target pemerintah tersebut tetapi tidak tertutup kemungkinan angka itu akan naik kembali dikarenakan budaya miskin di Sumatera Barat masih cukup tinggi.

Di Sumatera Barat walaupun tingkat kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 8 persen namun bukan berarti merata di kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Pada tingkat kabupaten, beberapa kabupaten tingkat kemiskinan masih diatas 8 persen, seperti di Kepulauan Mentawai yang mencapai 18,8 persen. Menurut Gubernur Sumatera Barat, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dengan memperbanyak kegiatan industrial saja, walaupun aktivitas ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Minangkabau yang enggan menjadi buruh, dan memilih membuka kegiatan usaha meski berskala kecil. Untuk itu kajian kemiskinan ini tidak bisa dikaji secara garis besar provinsi saja, sehingga harus dilihat per kabupaten/kotanya, agar bisa diketahui daerah mana yang masih butuh perhatian khusus untuk penganggulangan kemiskinan ini. (Prayitno,2013).

Sebelum menentukan kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan, setidaknya dikelompokkan dalam 2 kategori umum: faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan keahlian. Faktor non ekonomi mencakup kondisi kultur sosial dalam masyarakat, keadaan politik, kelembagaan dan sistem yang berkembang dan berlaku. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang faktor demografi yang mempengaruhi kemiskinan. Hal ini menjadi fokus penelitian dikarenakan faktor demografi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap faktor ekonomi dan non-ekonomi, sehingga dirasa paling mendasar untuk perlu dibenahi terlebih dahulu.

Faktor demografi meliputi: jumlah penduduk, komposisi penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan imigrasi. Dimana di indikasikan bahwa, menurut malthus semakin banyak jumlah penduduk akan semakin tinggi tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan kebutuhan pangan.

Selain itu penelitian ini ditujukan fokusnya kepada faktor demografi adalah karena belum adanya penelitian yang dilakukan untuk meneliti tentang kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat dengan kajian demografi. Selama ini banyaknya penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan di Sumatera Barat hanya berfokus pada faktor-faktor ekonomi saja. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis membahas tentang masalah demografi ini yang notabene memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang terjadi.

Berikut disajikan tabel 1 data tentang tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk dan rasio gender kabupaten kota di Sumatera Barat dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

Pada tabel 1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun ke tahunnya menurun, namun masih ada yang berfluktuatif seperti kabupaten 50 kota, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

Di daerah kabupaten tingkat kemiskinan masih tinggi, namun hasilnya tiap tahun menurun. Sedangkan daerah perkotaan yang persentase kemiskinannya rendah, justru berfluktuatif. Jumlah penduduk miskin yang berfluktuatif ini dikarenakan banyaknya penduduk yang keluar masuk ke daerah tersebut, karena daerah-daerah tersebut kebanyakan adalah pusat kegiatan ekonomi dibandingkan beberapa daerah disekitar daerah-daerah tersebut.

**Tabel 1. Tingkat Kemiskinan (%), Kepadatan Penduduk (jiwa) dan Rasio Gender (%)
Di Sumatera Barat Tahun 2009-2011**

No.	Kabupaten/ Kota	2009			2010			2011		
		Tingkat kemiskinan	Kpdtn Pddk	Rasio Gender	Tingkat kemiskinan	Kpdtn Pddk	Rasio Gender	Tingkat kemiskinan	Kpdtn Pddk	Rasio Gender
1	Kab. Mentawai	21,4	11	89,3523	19,82	12,67	92,8235	18,87	12,87	92,8422
2	Kab. Pesisir Selatan	10,55	77	101,8089	10,25	74,7	102,2570	9,78	74,83	102,2726
3	Kab. Solok	12,51	96	104,0519	11,76	93,25	44,6455	11,22	94,16	102,8528
4	Kab. Sijunjung	10,58	66	104,1444	10,45	64,46	100,2928	9,92	65,39	100,3072
5	Kab. Tanah Datar	7,07	252	103,9110	6,91	253,36	105,3321	6,63	255,16	105,3473
6	Kab. Padang Pariaman	13,21	293	116,8085	11,84	294,29	103,7387	11,32	296,62	103,7536
7	Kab. Agam	10,51	193	106,8664	9,87	203,76	103,8996	9,42	205,84	103,9147
8	Kab. 50 Kota	10,3	100	106,9160	10,47	103,91	101,9777	9,99	105,06	101,9924
9	Kab. Pasaman	13,38	59	102,8247	10,98	56,95	102,2363	10,46	64,91	102,2512
10	Kab. Solok Selatan	12,48	40	99,5704	11,16	43,12	98,8218	10,59	43,76	98,8349
11	Kab. Dharmasraya	11,48	63	98,2426	10,6	64,64	93,5667	10,05	65,89	93,5814
12	Kab. Pasaman Barat	10,16	100	99,4410	9,61	107,78	98,4160	9,11	95,43	98,4297
13	Kota Padang	6,03	1.260	100,9649	6,33	1.199,44	100,7060	6,03	1.214,91	100,7213
14	Kota Solok	6,68	1.038	105,8872	7,07	1.030,46	102,3093	6,63	1.046,17	102,3252
15	Kota Sawahlunto	1,83	200	105,2047	2,46	207,96	101,9317	2,44	210,25	101,9495
16	Kota Padang Panjang	7,43	2.456	96,7573	7,66	2.043,83	101,1554	7,35	2.070,39	101,1702
17	Kota Bukittinggi	6,68	4.271	113,0913	6,83	4.410,14	106,7267	6,47	4.473,53	106,7417
18	Kota Payakumbuh	10,2	1.329	102,9095	10,61	1.452,51	101,7912	10,13	1.472,52	101,8045
19	Kota Pariaman	4,95	964	111,5518	5,95	1.077,47	103,0805	5,63	1.090,40	103,0975

Tabel 1 juga menginformasikan bahwa pada tahun 2009 tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Mentawai dengan 21,40 persen dan rasio gender kabupaten tersebut 89,35 persen dapat diartikan bahwa daerah tersebut untuk setiap 90 orang perempuan terdapat 100 orang laki-laki dengan kepadatan penduduk 11 orang per kilometer persegi. Dilihat dari proporsi rasio gender dan kepadatan penduduk daerah tersebut seharusnya daerah tersebut tidak besar persentase kemiskinannya dilihat dari segi demografinya.

Tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2009 di tabel 1 adalah Kota Sawahlunto dengan tingkat kemiskinan sebesar 1,83 persen dan rasio gender Kota Sawahlunto 105,21 persen dan dapat diartikan bahwa setiap 105 orang perempuan berbanding dengan 100 orang laki-laki dengan kepadatan penduduk sebesar 200 orang per kilometer persegi.

Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan tertinggi di kabupaten/ kota Sumatera Barat masih ditempati oleh Kabupaten Mentawai dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,82 persen, angka ini turun dari tahun sebelumnya yaitu 21,40 persen. Rasio gender pada Kabupaten Mentawai tahun 2010 mengalami peningkatan dari sebelumnya 89,35 persen menjadi 92,82 persen dengan kepadatan penduduk perkilometer persegi pada tahun 2010 12,67 atau dibulatkan 13 jiwa per kilometer persegi.

Kota Sawahlunto pada tahun 2010 masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat dengan tingkat kemiskinan 2,46 persen. Rasio gender Kota Sawahlunto sebesar

101,93 persen dengan kepadatan penduduk 207,96 jiwa atau dibulatkan 208 jiwa per kilometer persegi.

Dilihat dari tabel 1 Kabupaten Mentawai pada tahun 2011 terus mengalami perbaikan kualitas kemiskinan dibanding tahun 2009 dan 2010, tingkat kemiskinan sebesar 18,87 persen tetapi dibandingkan 19 kabupaten/ Kota di Sumatera Barat lainnya Kabupaten Mentawai masih yang paling tertinggi.

Tahun 2011 Kota Sawahlunto masih menjadi kota dengan persentase terendah dibandingkan dengan 19 kabupaten/ kota di Sumatera Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,44 persen dengan kepadatan penduduk 210,25 jiwa atau dibulatkan menjadi 210 jiwa per kilometer persegi.

Jadi dari tahun ke tahun terlihat bahwa Kabupaten Mentawai selalu menjadi kabupaten dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan 19 kabupaten/ kota di Sumatera Barat, namun dari tahun ke tahun Kabupaten Mentawai selalu mengalami perubahan ke arah yang baik dibuktikan dengan selalu menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut.

Sawahlunto adalah kota dengan tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan 19 kabupaten/ kota di Sumatera Barat dari tahun 2009-2011, tetapi tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto tersebut tidak selalu menurun melainkan berfluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Pada tabel 1 terlihat pola hubungan secara umum antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan perbandingan tahun 2010 dan 2011 memiliki hubungan yang negatif, dimana jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan sedangkan tingkat kemiskinan menurun. Pola seperti ini

tidak sesuai dengan konsep tentang pertambahan hasil yang semakin menurun (*deminishing return*) yang dikemukakan oleh Malthus.

Pada tabel 1 juga menginformasikan tentang pola hubungan secara umum antara tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk tahun 2010 dan 2011 memiliki hubungan negatif kecuali untuk daerah kabupaten pasaman barat. Kabupaten pasaman barat pada tahun 2010 memiliki kepadatan penduduk 107,78 atau 108 jiwa per kilometer persegi sedang pada tahun 2011 menurun menjadi 95,43 atau 96 jiwa per kilometer persegi, dengan tingkat kemiskinan yang juga menurun.

Hubungan antara rasio gender dan tingkat kemiskinan tahun 2010 dan 2011 pada tabel 1 menggambarkan bahwa antara tingkat kemiskinan dan rasio gender memiliki hubungan yang negatif, dimana tingkat kemiskinan dari tahun 2010 menuju 2011 mengalami penurunan sedangkan rasio gender mengalami peningkatan. Artinya pada tahun 2011 kabupaten/kota di Sumatera Barat pertumbuhan laki-lakinya lebih banyak daripada pertumbuhan perempuan untuk masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor demografi lainnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat beban tanggungan, tingkat ketergantungan adalah angka yang mengukur beban ketergantungan antara jumlah penduduk kelompok usia yang belum produktif dan jumlah penduduk kelompok usia tidak produktif lagi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Berikut disajikan data tentang beban ketergantungan dari tahun 2009-2011:

Dari tabel 2 terlihat bahwa rata-rata kabupaten kota di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan beban ketergantungan. Dimana beban ketergantungan ini sebagian besarnya disumbangkan oleh beban ketergantungan pemuda. Artinya piramida penduduk di daerah Sumatera Barat masih berbentuk limas. Dimana bentuk piramida ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran di Sumatera Barat lebih tinggi di bandingkan dengan tingkat kematiannya. Disamping hal tersebut juga bisa diketahui bahwa beban ketergantungan yang masih tinggi mengartikan tingkat usia produktif yang rendah. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat.

Dari tabel 2 terlihat bahwa ada beberapa daerah yang beban ketergantungannya menurun dari tahun ke tahun, seperti: Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Hal ini mungkin dikarenakan oleh program-program pemerintah di daerah tersebut sudah berjalan dengan bagus, misalnya program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakatnya sehingga beban ketergantungan di daerah tersebut sudah berkurang

**Tabel 2. Rasio Beban Ketergantungan (%) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2009-2011**

NO	KABUPATEN / KOTA	2009			2010			2011		
		Beban Pemuda	Beban Tua	Beban Total	Beban Pemuda	Beban Tua	Beban Total	Beban Pemuda	Beban Tua	Beban Total
1	Kab. Mentawai	59,24	4,33	63,58	59,24	4,33	63,58	63,41	4,41	67,82
2	Kab. Pesisir Selatan	52,11	11,21	63,31	53,27	8,95	62,22	49,86	9,28	59,14
3	Kab. Solok	54,64	9,74	64,38	54,50	9,72	64,21	54,45	9,72	64,17
4	Kab. Sijunjung	53,30	7,45	60,75	54,78	7,61	62,39	54,78	7,61	62,39
5	Kab. Tanah Datar	44,86	10,98	55,85	49,54	13,89	63,43	49,57	100,00	63,40
6	Kab. Padang Pariaman	57,11	13,10	70,21	57,11	13,10	70,21	57,11	13,08	70,19
7	Kab. Agam	57,61	13,53	71,14	52,85	13,63	66,48	52,34	13,64	65,98
8	Kab. 50 Kota	46,80	11,82	58,62	51,38	12,39	63,77	51,32	12,26	63,58
9	Kab. Pasaman	5,85	7,50	13,35	5,89	7,49	13,39	5,94	7,50	13,44
10	Kab. Solok Selatan	50,52	7,75	58,27	54,91	7,36	62,27	54,91	7,36	62,27
11	Kab. Dharmasraya	52,30	4,81	57,11	52,30	4,81	57,11	49,55	5,94	55,50
12	Kab. Pasaman Barat	59,94	6,15	66,09	59,32	6,17	65,48	59,31	6,17	65,48
13	Padang	41,17	6,09	47,26	40,34	5,72	46,06	42,54	6,50	49,04
14	Solok	55,21	5,93	61,14	47,88	5,80	53,69	48,29	5,93	54,22
15	Sawahlunto	50,03	9,16	59,18	48,13	10,11	58,24	47,93	10,20	58,13
16	Padang Panjang	49,92	8,60	58,52	51,48	7,92	59,41	51,49	7,93	59,42
17	Bukittinggi	47,76	6,98	54,74	44,21	7,05	51,27	44,23	7,04	51,26
18	Payakumbuh	50,26	9,40	59,66	49,49	9,06	58,55	49,49	9,06	58,56
19	Pariaman	56,13	13,17	69,30	51,16	10,42	61,58	51,16	10,42	61,58

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2009-2011

Selain dari jumlah penduduk dan rasio ketergantungan yang mempengaruhi kemiskinan, faktor demografi lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah angka kelahiran dan kematian. Seperti halnya rasio ketergantungan, kelahiran juga berpengaruh terhadap kemiskinan yang terjadi. Semakin tinggi angka kelahiran dan semakin kecil angka kematian maka semakin tinggi juga kemiskinan yang terjadi.

Berikut disajikan data tentang Angka kelahiran bayi yang terjadi selama tahun 2009-2011 kabupaten/kota di Sumatera Barat :

**Tabel 3. Angka Kelahiran Bayi (jiwa)
Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2011**

Angka Kelahiran Bayi (Jiwa)					
No	Kabupaten Kota	2009	2010	2011	Rata-Rata
1	Kabupaten Mentawai	9,9	27,9	14,0	17,3
2	Kabupaten Pesisir Selatan	17,3	1,6	19,0	12,6
3	Kabupaten Solok	16,8	6,6	19,0	14,1
4	Kabupaten Sijunjung	21,3	17,5	22,3	20,4
5	Kabupaten Tanah Datar	12,7	15,3	17,5	15,2
6	Kabupaten Padang Pariaman	17,9	17,3	19,2	18,1
7	Kabupaten Agam	17,9	16,8	0	11,6
8	Kabupaten 50 Kota	19,2	12,0	17,2	16,1
9	Kabupaten Pasaman	19,7	19,3	19,8	19,6
10	Kabupaten Solok Selatan	17,4	10,0	15,9	14,4
11	Kabupaten Darmasraya	19,4	6,1	18,4	14,6
12	Kabupaten Pasaman Barat	20,2	10,1	19,9	16,7
13	Kota Padang	19,2	18,5	19,6	19,1
14	Kota Solok	21,6	11,1	0	10,9
15	Kota Sawahlunto	19,9	18,9	20,2	19,7
16	Padang Panjang	18,3	77,3	0	31,9
17	Bukittinggi	19,5	17,7	20,1	19,1
18	Payakumbuh	21,2	17,0	20,0	19,4
19	Kota Pariaman	22,2	14,2	21,3	19,2

Sumber BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2009-2011

Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa rata-rata angka kelahiran bayi tertinggi adalah pada Kota Padang Panjang dengan rata-rata angka kelahiran bayi sebesar 31,9 jiwa atau 32 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena program KB yang dicanangkan pemerintah di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak dapat menekan angka kelahirannya. Sedangkan angka kelahiran terendah adalah kota solok dengan angka kelahiran sebesar 10,9 jiwa atau 11 jiwa. Hal ini mungkin karena masyarakat kota solok secara menyeluruh telah berhasil mengikuti program KB yang dicanangkan pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena pembangunan diatas, penulis tertarik meneliti judul **“Analisis Pengaruh Demografi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana kepadatan penduduk mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat?
2. Sejauhmana gender mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat?
3. Sejauhmana dependensi Rasio (ketergantungan total) mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat?
4. Sejauhmana fertilitas mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat?

5. Sejauhmana kepadatan penduduk, gender, ketergantungan total dan fertilitas secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh :

1. Kepadatan penduduk mempengaruhi kemiskinan di kab/kota Sumatera Barat.
2. Gender mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat.
3. Dependensi Rasio (Ketergantungan total) mempengaruhi kemiskinan di kab/ kota Sumatera Barat.
4. Fertilitas mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat.
5. Kepadatan penduduk, gender, ketergantungan total dan fertilitas secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Pengembangan ilmu Ekonomi Pembangunan yaitu teori kemiskinan.
3. Peneliti lebih lanjut dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat.

4. Untuk pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana strategi mengurangi kemiskinan di kab./ kota Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL dan HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976. (Kuncoro,2006:115)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3)

rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. (<http://wikipedia.com>)

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Ketidak ikutsertaan dalam proses pembangunan ini disebabkan oleh secara alamiah atau tidak atau belum mampu mendayagunakan faktor produksi dan dapat pula terjadi secara alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi, berakibat manfaaat pembangunan pembangunan tidak menjangkau mereka. (Arsyad, 2004 : 237)

Selanjutnya menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan

dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu mendayagunakan faktor produksinya.

b. Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 211.726 per orang per bulan. Penetapan angka Rp 211726 per orang per bulan tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.(Kuncoro, 2006:115)

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan

perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

c. Ukuran Kemiskinan

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang hidup secara layak. Ukuran kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1) Kemiskinan Absolut

Menurut Todaro (2003:247) kemiskinan absolut yaitu mengukur kemiskinan dengan membandingkan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan yang dibutuhkan minimum merupakan pembatas antar keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

2) Kemiskinan Relatif

Menurut Miller (dalam Arsyad, 2004:239) walaupun pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi jauh masih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan yang bersangkutan.

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

d. Faktor-faktor Demografi Yang Mempengaruhi Kemiskinan

1) Jumlah Penduduk

Menurut Sadono Sukirno (2006:202) perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan

KB. Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk Negara sedang berkembang.

2) Pendidikan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan Rasidin K dan Bonar M (dalam Diponegoro Jurnal of Economic).

Lanjouw dalam Ginting (2008:18) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk

meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Todaro (2003:387) para orang tua semakin menyadari bahwa pada masa yang akan datang berbagai tempat kerja hanya mau menerima tenaga-tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, sehingga mereka terlanjur berkeyakinan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak ijazah atau sertifikat yang dimiliki anak-anak mereka, maka akan semakin baik pula kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan jaminan hidup yang jauh lebih memuaskan. Bagi golongan miskin, pendidikan bahkan dinggap sebagai salah-satunya untuk mengangkat anak-anak mereka dari lembah kemiskinan.

Arsyad (2004:243) pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi,

sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Penduduk dengan pendapatan kecil seringkali mengalami *trade-off* dalam menentukan keputusan melanjutkan sekolah, melanjutkan ke tingkat lebih tinggi atau tidak. Bagi yang memilih melanjutkan ke tingkat lebih tinggi akan mengorbankan beberapa tahun pendapatan yang tidak diperolehnya karena bersekolah. Hal ini adalah biaya tidak langsung. Selain itu ada juga biaya langsung seperti biaya sekolah, buku-buku dan pengeluaran lain selama menempuh pendidikan. Hasil yang akan diperoleh yaitu tingkat pendapatan yang nantinya akan diperoleh atas pendidikan yang dimiliki akan jauh lebih tinggi daripada ia tidak melanjutkan sekolah.

2. Pengaruh Demografi Terhadap Kemiskinan

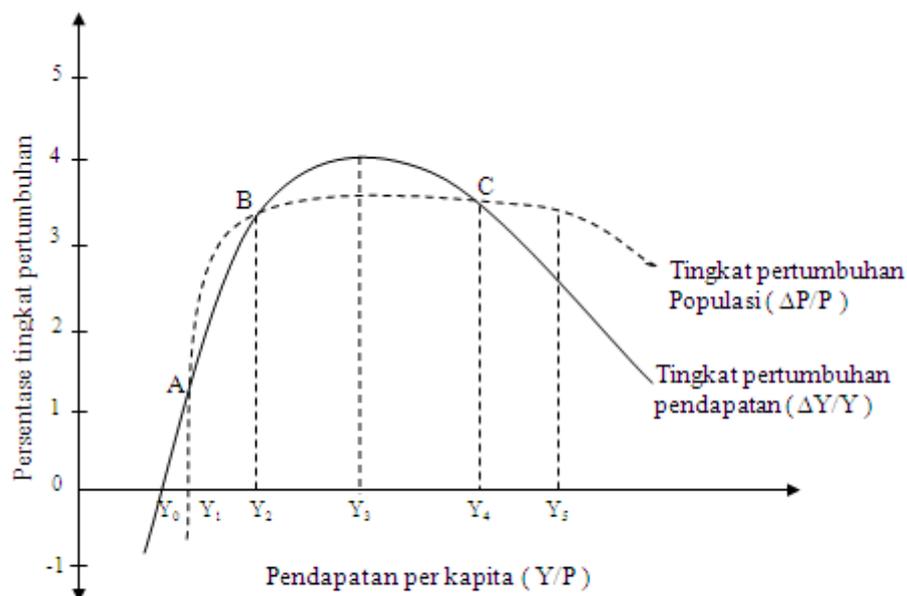
Sharp, et al dalam Mudrajat Kuncoro (2006:120) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya

manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) (dalam kuncoro, 2006:120) yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

a. Teori Jebakan Populasi Malthus

Thomas Malthus (Todaro, 2003:308) merumuskan sebuah konsep tentang penambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*). Lebih lanjut Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwasanya jumlah populasi suatu negara meningkat sangat cepat pada deret ukur atau tingkat geometrik (pelipatgandaan: 1,2,4,8,16,32, dan seterusnya) setiap 30 atau 40 tahun, kecuali hal itu diredam oleh bencana

kelaparan. Pada waktu yang bersamaan, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi



Gambar 1. Model Jebakan Populasi Malthus

yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmatik (1,2,3,4,5, dan seterusnya).

Model jebakan populasi ekuilibrium tingkat-rendah (*low-level equilibrium population trap*), atau biasa disingkat dengan model jebakan populasi Malthus (*Malthus population trap*). Model-model dasar yang merangkum gagasan Malthus dapat diperoleh dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva-kurva yang masing-masing mewakili laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat, dan kedua kurva ini dihubungkan dengan tingkat-tingkat pendapatan per kapita.

Pada diagram diatas umbu vertikal menunjukkan perubahan persentase secara numerik, baik yang positif maupun yang negatif, atas kedua variabel pokok tersebut (yakni, jumlah total penduduk serta pendapatan agregat). Adapun sumbu horizontal mengukur tingkat pendapatan per kapita. Kurva terputus-putus, yang melukiskan asumsi hubungan antara laju pertumbuhan penduduk, $\Delta P/P$ (diukur secara vertikal) dan tingkat pendapatan per kapita, Y/P (diukur secara horizontal). Pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah, Y_0 tingkat perubahan jumlah (laju pertumbuhan) penduduk sama dengan nol sehingga jumlah penduduk stabil.

Selanjutnya, diasumsikan pula, bahwa laju pertumbuhan tersebut akan tetap bertahan selama tingkat pendapatan per kapita belum cukup tinggi. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita ke taraf yang lebih tinggi dari Y_5 , maka sejalan dengan tahapan ketiga dari teori transisi demografi, tingkat kelahiran akan mulai menurun, sehingga kemiringan kurva pertumbuhan penduduk menjadi negatif dan kembali mendekati sumbu horizontal.

Menurut pendukung aliran pemikiran neo-Malthus, bangsa-bangsa yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai tingkat pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dari tingkat subsisten, kecuali apabila mereka mengadakan pemeriksaan preventif awal (*preventif checks*) terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan

secepatnya, maka pemeriksaan positif ala Malthus (*Malthus positive checks*) yakni, musibah kelaparan, wabah penyakit, perang, bencana alam yang akan tampil sebagai faktor utama penghambat pertumbuhan penduduk.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dewasa ini disebabkan oleh cepatnya transisi yang melanda kecendrungan penduduk dunia. Yakni, dari yang semula dicirikan oleh angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi, ke kecendrungan baru yang ditandai oleh tingkat kematian yang rendah dan tingkat kelahiran yang cukup rendah. Angka kelahiran di hampir semua negara maju memang sudah terbilang rendah, akan tetapi angka kelahiran di banyak negara-negara berkembang masih terhitung sangat tinggi, apalagi bagi sejumlah negara yang belum lama melaksanakan upaya-upaya pengendalian kelahiran atau program keluarga berencana. (Todaro, 2003 : 291)

Berdasarkan hal tersebut untuk dapat menekan tingkat kemiskinan harus dilakukan upaya penekanan atau pengendalian pertumbuhan penduduk dengan berbagai upaya agar angka kelahiran dan kematian yang rendah.

c. Struktur Kependudukan

1. Sebaran Per Wilayah Geografis

Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata, baik menurut wilayah geografis, tingkat kelahiran dan kematian, maupun menurut

struktur usia. Lebih dari tiga perempat penduduk dunia bertempat tinggal di negara-negara berkembang dan kurang seperempat bermukim di negara-negara maju(Todaro, 2003 : 295).

Ketidak merataan distribusi penduduk ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi. Semakin padat penduduk di suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi. Ketidak merataan ini juga berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan yang terjadi.

2. Tren Tingkat Kelahiran dan Kematian

Secara kuantitatif, tingkat penambahan penduduk (*rate of population increase*) dihitung atas dasar persentase kenaikan relatif (atau persentase penurunan, yakni dalam kasus penambahan penduduk yang negatif) dari jumlah penduduk neto per tahun yang bersumber dari penambahan alami (*natural increase*) dan migrasi internasional neto (*net international migration*). (Todaro, 2003 : 297)

3. Struktur Usia dan Beban Ketergantungan

Dewasa ini, penduduk dunia pada umumnya terdiri dari manusia berusia muda, khususnya di negara-negara dunia ketiga. Hampir 40 persen penduduk di negara-negara dunia ketiga terdiri dari anak-anak berusia dibawah 15 tahun, sedangkan di negara-negara maju jumlah generasi mudanya hanya 20 persen dari total penduduknya.

Rasio ketergantungan pemuda (*youth dependensi ratio*) yakni, perbandingan antara pemuda dibawah usia 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri, dengan orang-orang dewasa yang aktif atau

produktif secara ekonomis berusia 15 hingga 64 tahun – sangat tinggi. Hal itu berarti angkatan kerja di negara-negara berkembang harus menanggung beban hidup anak-anak mereka yang besarnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan angkatan kerja di negara-negara kaya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, akan semakin besar pula proporsi penduduk berusia muda yang belum produktif dalam total populasi, dan semakin berat pula beban tanggungan penduduk yang produktif. Fenomena ketergantungan penduduk berusia muda ini selanjutnya menimbulkan konsep lain, yakni apa yang disebut sebagai momentum pertumbuhan penduduk/ populasi yang tersembunyi (*hidden momentum of population growth*). (Todaro, 2003 : 299)

d. Teori Keseimbangan Tingkat Rendah

Menurut Nelson “Penyakit ekonomi negara berkembang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup”. Pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita, laju tabungan dan setelah itu investasi netto keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total, ternyata dibuntuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mendorong balik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya. Jadi

ekonomi negara terbelakang terjat dalam *perangkap keseimbangan tingkat rendah*.

Nelson (Jhingan,2003:173) menyebutkan empat kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap tersebut, yaitu :

1. Korelasi tinggi antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk.
2. Kecendrungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan perkapita tambahan guna meningkatkan investasi perkapita.
3. Kekurangan lahan yang baik untuk ditanami.
4. Metode produksi yang tidak efisien.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian yang relevan ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dibawah ini akan dikemukakan hasil-hasil studi yang dirasa perlu dan relevan dengan penelitian penguji.

1. Bungaran Silalahi (2011). Hasil penelitiannya Dengan menggunakan model analisis *Ordinary Least Square* (OLS) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap PDRB harga konstan, rasio penduduk sekolah pada sekolah menengah mewakili sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap PDRB harga konstan, sedangkan migrasi keluar tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB harga konstan.

2. Amy Purwa Aditia (2010). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas (IPM, tenaga kerja, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, *dependency ratio*) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
3. Sagung Gede Rahmawati (2005), Distribusi pendapatan serta perbedaan karakteristik kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di kabupaten Klaten tahun 2005 (studi kasus kecamatan Klaten Utara dan Bayat). Masalah yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah a) pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan demografi terhadap pendapatan keluarga, b) pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan demografi terhadap klasifikasi keluarga, dan c) ada tidaknya perbedaan kemiskinan antara di daerah pedesaan dan perkotaan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep yang menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antar pvariabel yang diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Keterkaitan maupun hubungan antar variabel yang diteliti diuraikan dengan berpihak pada kajian teori diatas.

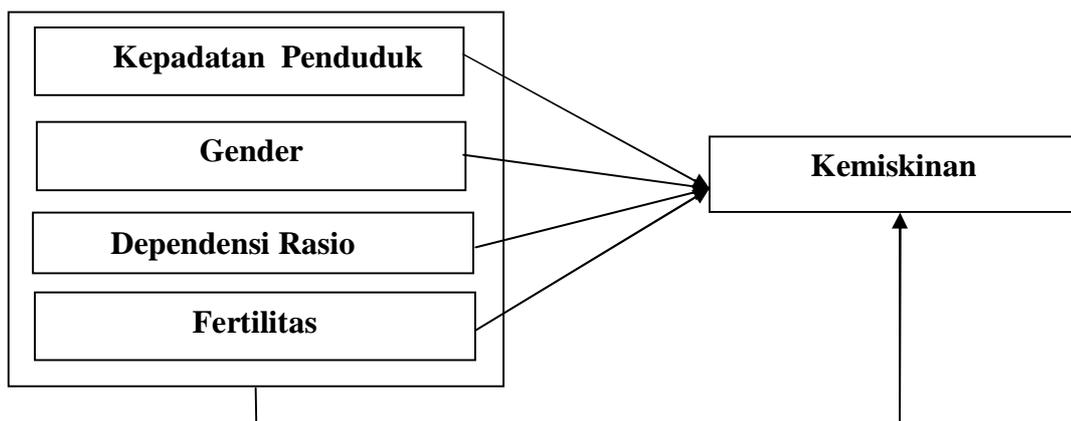
Sebagaimana telah diterangkan pada bagian terdahulu, kemiskinan dalam penelitian ini akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel yang mempengaruhi kemiskinan antara lain : variabel penduduk yang terdiri jumlah

penduduk dan kepadatan penduduk, variabel gender dan variabel beban ketergantungan yang terdiri dari ketergantungan total, ketergantungan muda dan fertilitas.

Variabel penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel gender mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel beban ketergantungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Variabel penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan dan signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan yang terjadi, sebagaimana yang telah diterangkan pada bahagian terdahulu.

Untuk lebih jelas keterkaitan variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema/bagan konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Konseptual Analisis Faktor Demografi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat.

D. Hipotesis Penelitian

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penduduk terhadap kemiskinan.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan gender terhadap kemiskinan.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dependensi Rasio terhadap kemiskinan.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

- d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan fertilitas terhadap kemiskinan.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

- e. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penduduk, gender, beban ketergantungan dan fertilitas terhadap kemiskinan.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien } \beta \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, rasio gender, ketergantungan total dan fertilitas terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan di Sumatera Barat baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk berdasarkan uji hipotesis pertama berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan kepadatan penduduk tidak memiliki peran penting terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Rasio gender berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan bahwa Rasio Gender tidak memiliki peran penting terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
3. Dependensi Rasio (Ketergantungan total) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan bahwa ketergantungan total memiliki peran penting terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
4. Fertilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan bahwa fertilitas tidak memiliki peran penting terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Sumatera Barat disarankan untuk tetap selalu memantau perkembangan kepadatan penduduk di kabupaten kota agar tingkat kemiskinan dapat selalu terkendali dengan baik.
2. Pemerintah Sumatera Barat disarankan agar dapat terus mengembangkan program-program yang dapat menunjang peningkatan penghasilan keluarga khususnya program-program untuk ibu-ibu rumah tangga dan perempuan agar tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dapat terkendali dengan baik.
3. Pemerintah Sumatera Barat diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam Pengembangan industri kreatif untuk anak-anak muda di Sumatera Barat dan mensosialisasikan program wirausaha kepada anak-anak usia sekolah yang ada di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Amy Purba. 2010. "*Pengaruh faktor-faktor Demografi terhadap pertumbuhan ekonomi 35 kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008*". Skripsi. Jawa Tengah
- Ajija, R. Shochrul, Dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews Salemba Empat*: Jakarta
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Stim Ykpn. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka 2009-2011*. Bps Sumatera Barat. Sumatera Barat.
- Boex Et Al, 2005, *Fighting Poverty Through Fiskal Decentralization*, Washington,D.C, Usaid.
- Fahirah.2012. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Sulawesi Selatan*". Skripsi. Uhm: Makasar.
- Ginting, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. 2008. *Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.1, Agustus Wahana Hijau. Yogyakarta.
- Gujarati, Damador. 2003. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga. Jakarta.
- , 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Stim Ykpn. Yogyakarta.
- Mankiew, Gregory, 2000, *Teori Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Oates, W, 1997, *Fiscal Decentralization And Economic Development*, National Tax Journal,
- Prayitno, Irwan. 2013. " Wawancara Bersama Gubernur Sumbar:". Di akses April 2013 pada <http://clasyfm.co.id>
- Rahmwati, Sagung Gede. 2005. "*Distribusi pendapatan serta perbedaan karakteristik kemiskinan di perkotaan dan pedesaan dikabupaten Klaten tahun 2005*". Skripsi. Klaten
- Sasana, Hadi. 2009 *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.1, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang